

# Bab I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Menilik segi geografi yang sangat strategis, kebijakan yang dirancang Pemerintah Iran sering kali berpengaruh besar pada dunia. Bukan hanya masalah lokasi negara yang terletak di antara negara-negara penting, juga karena Iran memiliki peran besar dalam pengadaan sumber daya alam[1].

Luas wilayah Iran sekitar 1.648.195 kilometer (636.296 mil) persegi, Iran merupakan negara terluas ke-16 di dunia. Iran dikelilingi negara-negara penting di kawasan benua Asia dan Eropa, seperti Turki, Rusia, Afghanistan, Pakistan, dan Irak. Batas-batas negara Iran dengan para tetangganya terdiri 5.170 km garis batas daratan dan 2.510 km garis batas air. Garis batas terpanjang –hampir seluruhnya- ada di sebelah utara, yaitu perbatasan dengan (bekas) Uni Soviet, sepanjang 1.740 km sebagai daerah perbatasan bersama termasuk 630 km batas air. Daerah perbatasan Iran dengan Irak, di sebelah barat daya, sepanjang 1.280 km, dan perbatasan dengan Turki di barat laut sepanjang 470 km. Dengan Afghanistan di timur laut, Iran bertatap batas sepanjang 850 km, sedangkan dengan Pakistan sepanjang 830 km. Teluk Parsi dan Laut Oman terletak di selatan, dengan garis tapal batas perairan sepanjang 1.880 km[2].

Dalam posisi tersebut Iran selalu menjadi salah satu faktor terpenting dari segi global negara-negara besar. Bukan hanya dari segi politik, tetapi juga dari segi ekonomi. Hal ini disebabkan karena Iran berada di jalur pelayaran internasional. Arus suplai minyak dari negara-negara Timur Tengah sebagian besar diangkut melalui Teluk Parsi dan Selat Hormuz. Sebagian besar keperluan minyak negara-negara Blok Barat (khususnya Eropa Barat dan Jepang) juga tergantung pada jalur pelayaran di perairan Teluk Parsi. Ketika Shah Reza Pahlevi masih berkuasa, AS menjadikan Iran sebagai “polisi” di kawasan Teluk Parsi. Untuk mengamankan jalur pelayaran minyak di kawasan itu, AS memberikan bantuan militer secara besar-besaran pada Shah Iran[3].

Pada masa pemerintahan Shah nampak bahwa kebijakan luar negeri Iran tidak jauh berbeda dengan kebijakan domestiknya. Namun nilai lebih dari kebijakan hubungan dengan negara lain adalah pengaruhnya yang besar dalam kebijakan dalam negeri. Shah berani menyebut kebijakan yang ia ciptakan sebagai ‘kebijakan nasional yang mandiri.’ Tapi dalam kenyataannya hal itu tidaklah nasional apalagi mandiri. Pembuat keputusan tidak menciptakan suatu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Pihak yang menguasai negara adalah mereka yang tak memiliki kapasitas apapun untuk mengambil keputusan atas dasar hajat hidup orang banyak karena Shah menempatkan saudara dan kerabat dekatnya sebagai pembuat kebijakan itu[4]. Saudara dan kerabat dekat ini adalah kaum birokrat kaya dan memiliki harta melimpah. Mereka umumnya tidak merasakan penderitaan bangsa Iran yang saat itu sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan[5].

Absennya kehadiran masyarakat dalam menghasilkan suatu kebijakan, membuat Iran tergantung pada kekuatan asing untuk menopang. Maka itu wajar saja bila akhirnya keputusan itu tak bersifat mandiri apalagi nasional. Ketergantungan terlalu besar pada negara asing –AS- yang membuat kemandirian Iran goyah. Shah tak ragu mencari sekutu yang tepat, begitu ia menemukannya dengan cepat ia akan menyerah pada kekuatan sekutu asing itu. Tujuannya tak lain agar Iran dilindungi dan

didukung dalam beberapa hal. Pihak AS juga tak ragu memelihara sekutunya ini agar tak jatuh ke musuh besarnya saat itu, Uni Soviet. AS pun mulai memberi perlindungan dengan berbagai bentuk bantuan dalam banyak hal, termasuk nuklir yang dimulai tahun 1950-an.

Tenaga nuklir baru mengalami perkembangan berarti pada akhir 1960-an ketika Amerika Serikat menyuplai 5 Mega Watt *Thermal Research Reaktor* (TRR) untuk *Teheran Nuclear Research Centre* (TNRC). Ketika pendapatan negara membengkak karena minyak tahun 1973, Shah memiliki ambisi memajukan Iran dimata dunia. Oleh karena itu ia mengalokasikan uang negara pada bidang militer termasuk pendirian fasilitas nuklir Iran, *Atomic Energy Organization of Iran* (AEOI). Tahun 1968, Iran menandatangani NPT[6] (*Nuclear Non Proliferasi Treaty*) untuk mempercepat negosiasi persetujuan nuklir terutama dari Amerika Serikat. Ratifikasinya baru selesai dua tahun kemudian tepatnya di tahun 1970[7].

Sebelum ratifikasi ini selesai, AS sudah lebih dulu membuat beberapa perjanjian dengan Iran[8]. Pertama, perjanjian antara Iran-AS-IAEA (*International Atomic Energy Agency*) untuk pengiriman bantuan pengayaan uranium dan plutonium untuk kebutuhan eksperimen reaktor nuklir Iran pada tanggal 7 Juni 1967, di Wina, Austria. Kedua, perjanjian antara ketiga pihak yang sama menyoal aplikasi pengukuran keamanan nuklir pada 4 Maret 1969 di Wina, Austria.

Untuk mewujudkan rencana besarnya, Shah menekankan pembangunan nuklir yang kuat bagi para penelitiannya di AEOI. Meski tidak mempunyai rencana yang jelas, namun salah satu mantan ketua badan atom Iran, Akbar Etemad, menyatakan kalau Shah sama sekali tidak memiliki niat penggunaan nuklir untuk militer dan murni untuk kebutuhan program sipil. Di akhir 1970-an, tepatnya setelah Revolusi, pihak Amerika Serikat telah mencium kecurangan yang dilakukan para peneliti TNRC. Terlihat kalau para pemikir ini menggunakan fasilitas nuklir untuk pengembangan senjata nuklir, pengayaan plutonium, dan penelitian laser. Singkat kata, pasca jatuhnya Shah terlihat kalau pengembangan nuklir Iran adalah yang terbaik di Timur Tengah saat itu[9].

Ketika kekuasaan beralih dari Shah ke Khomeini di tahun 1979, terjadi perbedaan kebijakan tentang nuklir. Khomeini menghancurkan fasilitas nuklir karena dianggap sebagai salah satu bentuk kekuasaan AS di Iran. Pemimpin spiritual itu juga mengancam menghukum mati para peneliti nuklir yang terlibat dalam pembangunan fasilitas tersebut. Akibatnya banyak para peneliti Iran eksodus keluar negeri karena keadaan dalam negeri yang tidak menentu. Namun perang yang berkecamuk dengan Irak periode 1980-1988 membuat fasilitas nuklir kembali bangkit.

Tapi dari sisi sumber daya alam, Iran sudah mengalami banyak kehilangan karena sumber daya uraniumnya terkuras akibat pengeboman atau penyerangan yang kerap terjadi selama delapan tahun. Khomeini akhirnya pun sadar dengan kehilangan ini dan mulai kembali membangun proyek nuklir. Iran dibantu oleh China dan Korea Utara, bantuan yang tidak sekedar persenjataan tapi juga amunisi untuk proyek Bushehr (nuklir). *Power plant* akhirnya dibangun di Bushehr dengan kerjasama bersama Siemens dari Jerman. Pembangunan tersebut berjalan tanpa gangguan hingga bangkit kembali ditahun 1984 bersamaan dengan dibukanya pusat penelitian nuklir baru di kota Isfahan. Berikutnya menyusul kota Bushehr, Natanz -pengembangan fasilitas uranium- ; Arak -*heavy water production plant*-; ditambah lagi adanya penemuan sumber uranium baru di kota Saghand, provinsi Yazd. Pengungkapan kedua hal ini membuat pihak Barat berang karena akan memperkuat dan melengkapi siklus nuklir Iran[10].

Penolakan Iran melucuti senjata nuklirnya semakin memperuncing hubungan AS dan Iran terutama ketika di tahun 2005, saat Mahmoud Ahmadinejad terpilih sebagai Presiden Iran. Pemimpin karismatik yang merupakan mantan aktivis mahasiswa ini memang dikenal sangat keras dalam menentang pengaruh Barat di negaranya. Bagi Ahmadinejad nuklir bisa digunakan untuk tenaga listrik yang berguna untuk kehidupan masyarakat Iran. Kalaupun Iran ingin menggunakannya sebagai senjata militer, itu dianggap sebagai hak-hak bangsanya. Apalagi Iran memiliki sumber daya yang memadai, mulai dari sumber daya alam hingga manusia.

Untuk membuktikan fasilitas nuklir Iran tidak berbahaya, Ahmadinejad sengaja mengundang pihak Barat, PBB, dan IAEA, untuk mengunjungi situs-situs nuklirnya. Mantan walikota Teheran itu berani menantang kalau memang situs tersebut berbahaya, maka negaranya siap menanggung sanksi. Namun, undangan ini malah tidak ditanggapi AS dan sekutu, dan terus menekan Iran di meja Dewan Keamanan PBB. Tapi hal ini malah makin menguatkan kecintaan rakyat pada Ahmadinejad. Pasalnya, dalam sejarah masyarakat Muslim Iran, Ahmadinejad dinilai sebagai sosok yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islami. Seperti komitmen terhadap agama, penegakkan keadilan, atau pun keinginan untuk mengabdikan pada rakyat dan negara. Tak ada keuntungan apa pun yang akan dikeruk oleh Ahmadinejad dari kebijakan kontroversial ini selain kesejahteraan masyarakat Iran.

Namun, dari kacamata Barat, Ahmadinejad memiliki agenda lain di balik penolakannya pada AS. Yaitu memperluas pengaruhnya di Timur Tengah terutama di Irak. Ia dituding akan memperluas sayap militernya di negara yang tengah diinvasi oleh AS itu. Dengan begitu, ketika ada serangan dari AS, sayap tersebut akan siap untuk diluncurkan. Selain itu, Ahmadinejad yang merupakan mantan guru ingin segala pemikiran dan perkataannya didengar oleh orang banyak. Apalagi karena kondisi politik Iran yang dianggap AS tidak lagi kondusif untuk Ahmadinejad. Oleh karena itu ia memerlukan wadah lain di luar Iran, agar bisa berpendapat dan menyelamatkan posisinya di dalam negeri.

Untuk mencegah pengaruh dan kekuasaan ini, AS mendesak dewan keamanan PBB dan IAEA sebagai organisasi nuklir dunia untuk memberikan informasi terkait program nuklir Iran. Penolakan tersebut dilanjutkan oleh beberapa negara dengan berinisiatif melakukan pertemuan terbatas dalam rangka meluluskan keinginan agar permasalahan krisis nuklir Iran segera dibawa ke Dewan Keamanan PBB.

Akhir tahun 2005 hingga awal tahun 2006, AS dan sekutu melakukan upaya intensif mencegah perkembangan nuklir Iran. Mereka tak hentinya meyakinkan anggota PBB lain kalau pengembangan nuklir Iran benar-benar digunakan untuk pengembangan senjata. Sebaliknya Iran tetap juga pada pendiriannya kalau pengembangan nuklir ditujukan untuk tujuan baik dan kesejahteraan masyarakat Iran. Bulan Agustus 2005, tiga sekutu AS (Perancis, Jerman, dan Inggris)

mengadakan pendekatan berbeda dengan menawarkan 'barter' dengan Iran. Tiga negara Eropa Barat itu menawarkan bantuan teknis, akses ke teknologi, dan keuntungan lainnya yang menyangkut dengan nuklir. Segala 'kebajikan' itu akan didapat Iran bila mereka bersedia menghentikan pengayaan uranium. Tawaran ini ditolak Iran karena mereka sudah mendapat persetujuan Badan Atom Internasional –IAEA- untuk melanjutkan kegiatan nuklirnya[11].

Sebenarnya bisa dipahami jika pandangan kedua pihak berbeda terhadap isu nuklir tersebut. Ini karena perbedaan pijakan yang diambil. Pandangan Iran mengacu atas dasar kebutuhan dan keinginan pengembangan teknologi, sedangkan pandangan lain berdasar atas kekhawatiran dan kecurigaan akan terjadinya penyelewengan program tersebut.

Kedua pandangan tersebut dijadikan dasar dalam pembahasan isu nuklir ini. Pertama, hak pengembangan ilmu dan teknologi serta pemenuhan kebutuhan energi. Kedua adalah isu yang telah lama menjadi masalah yang berkaitan dengan kepentingan politik khususnya politik perang dengan memanfaatkan teknologi nuklir untuk kepentingan produksi senjata nuklir. Bagian pertama, PBB telah menyepakati bahwa setiap negara mempunyai hak untuk mengembangkan teknologi tanpa intervensi negara lain. Pada sisi lain, hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan energi negara dimana nuklir bisa menjadi salah satu alternatif sumber energi.

Sebagai negara merdeka seperti Iran tentu berhak mempunyai kebijakan tersebut dan karena juga mempunyai kemampuan sumber daya alam dan manusia yang mereka miliki. Pandangan kedua merupakan pandangan yang paling sulit dipecahkan terutama adanya kepentingan politik global, dimana isu ini merupakan turunan dari perang dingin yang terjadi antara AS dan Rusia terutama dalam program NPT[12].

Kedua pandangan yang saling berseberangan ini akhirnya menimbulkan konflik di antara kedua negara, AS dan Iran. Berbagai cara dilakukan untuk meyakinkan dunia internasional kalau pandangan masing-masinglah yang paling benar. AS akan menggunakan kekuasaannya sebagai negara adidaya mempengaruhi negara-negara kuat untuk ikut bersekutu melawan Iran. Sedangkan Iran sebagai lawan yang dianggap kecil, melawan dengan memainkan beberapa kunci kebutuhan dunia.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Ahmadinejad mampu mempertahankan pandangan negaranya soal kebijakan nuklir Iran. Ia berani tampil dan membela kepentingan negaranya karena merasa bergerak dalam kerangka hukum yang sama dengan negara lain yang memiliki pengembangan teknologi nuklir. Namun di lain pihak, AS merasa apa yang dilakukan Iran adalah suatu ancaman untuk keselamatan umat manusia dan dunia.

Dari sini bisa dilihat ada beberapa masalah yang coba diangkat oleh skripsi ini, yaitu;

1. Seberapa besar pengaruh Ahmadinejad dalam kebijakan nuklir Iran?
2. Mengapa Ahmadinejad didukung oleh masyarakat Iran dalam penerapan kebijakan nuklir ini?
3. Bagaimana kepemimpinan Ahmadinejad soal senjata nuklir dibanding pemimpin sebelumnya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan kebijakan nuklir Iran pada masa sebelum Ahmadinejad dan pada saat Ahmadinejad berkuasa.
2. Menjelaskan peranan Ahmadinejad sebagai Presiden Iran dalam menentukan kebijakan nuklir negaranya.

## 1.4 Kerangka Teori

Semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain; di satu pihak dia ingin kerjasama, di pihak lain dia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia. Dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungannya dengan manusia yang lain, pada dasarnya setiap manusia menginginkan beberapa nilai. Dengan adanya berbagai nilai dan kebutuhan yang harus dilayani maka manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok. Masyarakatlah yang mencakup semua hubungan dan kelompok di dalam suatu wilayah[13]. Masyarakat didefinisikan Robert Maciver sebagai suatu sistem hubungan-hubungan yang ditertibkan (*society means of system of ordered relations*)[14]. Dilihat dari definisi diatas terlihat jika manusia dibiarkan mengejar kepentingannya masing-masing dan bersaing secara bebas tanpa batas, maka akan timbul keadaan yang penuh pertentangan yang dapat merugikan masyarakat secara. Hadirlah institusi negara sebagai asosiasi pemenuhan kebutuhan pengaturan manusia dan bertujuan untuk menyelenggarakan perlindungan serta penertiban dan untuk itu diberi monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah[15]. Dengan kata lain, negara diberi kekuasaan.

Bertrand Russel secara singkat menyatakan, “Kekuasaan merupakan hasil pengaruh yang diinginkan, dorongan untuk mendapatkan, atau memegang sesuatu (kekuasaan)[16]. Definisi ini ditegaskan lagi oleh Soelaeman Soemardi dengan menekankan kalau kekuasaan itu pada hakikatnya merupakan dominasi (*dominance*) dan bersifat memaksa (*coercion*)[17]. Sumber-sumber kekuasaan terdapat dalam pelbagai segi. Dia dapat bersumber pada kekerasan fisik (misalnya seorang polisi dapat memaksa penjahat untuk kejahatannya karena dari segi persenjataan polisi lebih kuat); dapat juga bersumber pada kedudukan (misalnya, seorang komandan terhadap bawahannya), pada kekayaan (misalnya, pengusaha kaya dapat mempengaruhi seorang politikus melalui kekayaannya); atau pada kepercayaan (misalnya, seorang pendeta terhadap umatnya). Dari banyak bentuk kekuasaan ini ada bentuk yang penting, yaitu kekuasaan politik. Dalam hal ini kekuasaan politik adalah “kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri”. Kekuasaan politik tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara di bidang administratif, legislatif, dan yudikatif[18].

Dalam negara Republik seperti Iran, kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang *Supreme Leader* dalam hal ini Ali Khomeini. Namun dalam penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan dipercayakan pada peran Eksekutif (Presiden) yaitu Mahmoud Ahmadinejad. Ahmadinejad berperan sebagai pemimpin Pemerintahan Republik Islam Iran yang bertanggung jawab menerapkan hukum atas dasar kesejahteraan orang banyak.

Kepemimpinan sendiri menurut teori Herman ALT berasal dari kata pimpin yang memuat dua hal pokok yaitu: pemimpin sebagai subjek, dan yang dipimpin sebagai objek. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan ke-pemimpinannya[19].

Pemimpin memiliki beberapa peran untuk masyarakatnya, seperti[20] :

- Pengarah visi

Sebuah visi adalah pernyataan yang secara relatif mendeskripsikan aspirasi atau arahan untuk masa depan organisasi. Dengan kata lain sebuah pernyataan visi harus dapat menarik perhatian tetapi tidak menimbulkan salah pemikiran. Agar visi sesuai dengan tujuan organisasi di masa mendatang, para pemimpin harus menyusun dan menafsirkan tujuan-tujuan bagi individu dan unit-unit kerja

- Pengendalian organisasi (dalam hal ini negara)

Pemimpin harus bisa mengendalikan mengelola harta milik atau aset organisasi; mengendalikan kualitas kepemimpinan dan kinerja organisasi; menumbuhkembangkan serta mengendalikan situasi maupun kondisi kondusif yang berkenaan dengan keberadaan hubungan dalam organisasi.

- Pemelihara masyarakat

Dalam organisasi merupakan pekerjaan kepemimpinan yang berat bagi pemimpin. Oleh sebab itu diperlukan pengetahuan, seni dan keahlian untuk melaksanakan kepemimpinan yang efektif.

- Menangani konflik

Ruang lingkup peran pengendali organisasi yang melekat pada pemimpin meliputi pengendalian pada perumusan pendefinisian masalah dan pemecahannya, pengendalian pendelegasian wewenang, pengendalian uraian kerja dan manajemen konflik.

- Pembangkit semangat.

Peran membangkitkan semangat kerja dalam bentuk memberikan dukungan, bisa dilakukan melalui kata-kata , baik langsung maupun tidak langsung, dalam kalimat-kalimat yang sugestif.

Dalam kepemimpinan terdapat beberapa gaya dan perilaku yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Untuk gaya kepemimpinan Ahmadinejad, Penulis coba menjelaskannya dengan gaya kepemimpinan kharismatik. Yaitu seorang pemimpin kharismatik memiliki karakteristik yang khas yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar dan para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tertentu itu dikagumi. Pengikutnya tidak mempersoalkan nilai yang dianut, sikap, dan perilaku serta gaya yang digunakan pemimpin itu[21].

Seperti dijelaskan sebelumnya, Presiden di Iran memiliki kekuasaan untuk menerapkan kebijakan dan hukum demi kesejahteraan masyarakatnya. Ini artinya kebijakan yang diterapkan oleh Ahmadinejad ditujukan untuk publik. Kebijakan publik menurut Thomas Dyle (181:1) adalah apapun pilihan Pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*publik policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh Pemerintah disamping yang dilakukan ketika Pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakn publik tersebut dibuat oleh badan Pemerintah bukan

swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan Pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar Pemerintah<sup>[22]</sup>.



## 1.5 Alur Pemikiran

Peran Ahmadinejad sebagai pemimpin:

- Pemelihara masyarakat
- Pengendali negara
- Pengarah visi
- Menangani konflik
- Pemberi semangat bangsa Iran

Kebijakan nuklir Iran pada masa pemerintahan Ahmadinejad

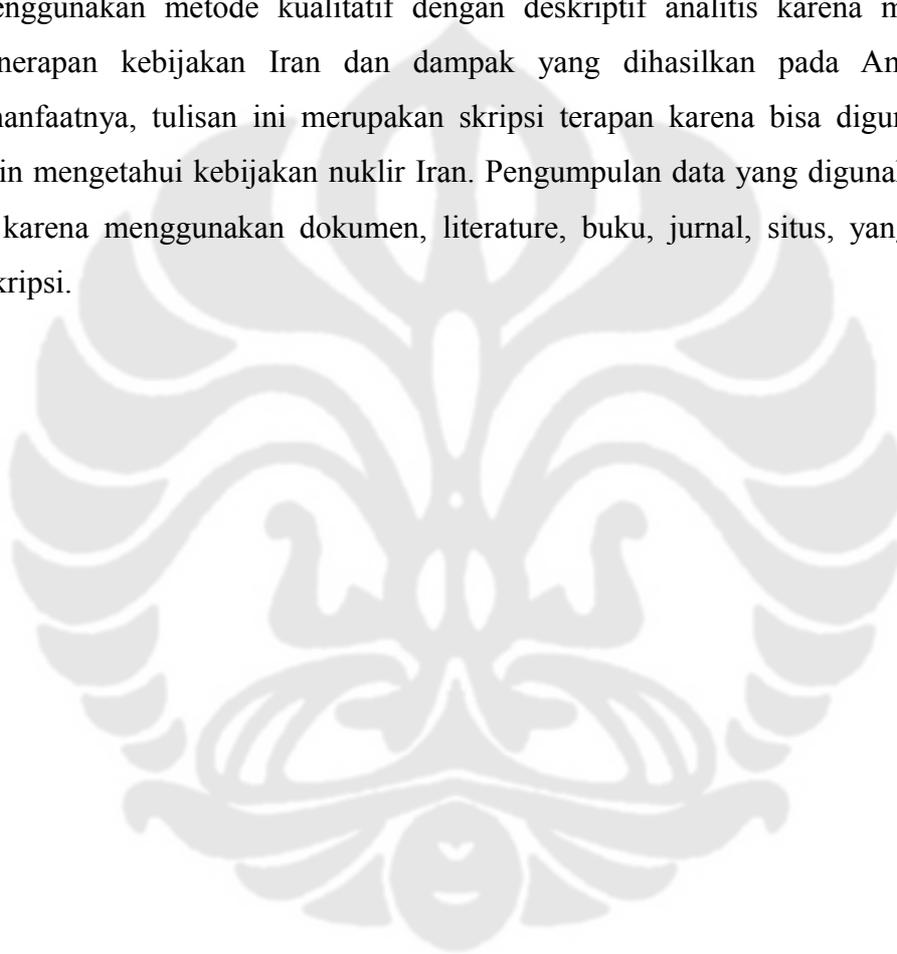


## **1.6 Asumsi Penelitian**

Peranan Ahmadinejad sebagai pemelihara masyarakat, pengendali negara, pengarah visi, menangani konflik, dan pemberi semangat bangsa Iran mempengaruhi kebijakan nuklir Iran di masa pemerintahannya.

## **1.7 Metode Penelitian**

Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analitis karena menggambarkan bagaimana penerapan kebijakan Iran dan dampak yang dihasilkan pada Amerika Serikat. Berdasarkan manfaatnya, tulisan ini merupakan skripsi terapan karena bisa digunakan berbagai pihak yang ingin mengetahui kebijakan nuklir Iran. Pengumpulan data yang digunakan merupakan data sekunder karena menggunakan dokumen, literature, buku, jurnal, situs, yang berhubungan dengan judul skripsi.



## 1.8 Sistematika Penulisan

1. Bab I berisi tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan signifikansi penelitian, kerangka teori, alur pemikiran, asumsi penelitian, serta metode penelitian. Semua hal yang menjadi dasar segala isi tulisan di bab-bab berikutnya. Dalam bab ini akan terlihat apa saja alasan penulis menjadikan hal ini penting untuk diangkat menjadi sebuah karya tulis berwujud skripsi.
2. Bab II membahas kebijakan nuklir yang diterapkan Iran beserta alasan kebijakan tersebut. Sebelum Ahmadinejad berkuasa ada beberapa pendahulunya yang juga memiliki kebijakan sendiri dalam hal nuklir. Dari sini nantinya akan terlihat perbedaan kebijakan yang dianut para pemimpin terdahulu Iran dibanding dengan Ahmdinejad.
3. Bab III menjelaskan kebijakan nuklir yang diterapkan Ahmadinejad di Iran. Penjelasan di bab ini sudah bisa memperlihatkan betapa berbedanya peranan Ahmadinjead dibanding para pemimpin pendahulunya.
4. Bab IV membahas soal kontroversi yang ditimbulkan dari kebijakan nuklir Iran.
5. Bab V, kesimpulan dan penutup